

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance government*), telah mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk merepakakan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo,2006).

Praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan suatu konsep yang didasari oleh teori keagenan. Pemerintah yang bertindak sebagai agen mempunyai kewajiban menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah yang bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai, oleh karena itu informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif sebagaimana disebutkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintah ( PP No. 24 Tahun 2005 yang telah direvisi menjadi PP No.71 Tahun 2010 ) antara lain: Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, Dapat dipahami. Apabila informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disebutkan dalam PP No.17 tahun 2010, berarti pemerintah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, jika tidak memenuhi maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, defisit penerimaan, kelemahan administrasi ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (Dyah, Bestari 2015).

Laporan keuangan merupakan sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi. Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Kometensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangan nya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Widodo (2001) dalam Kharis (2010) menjelaskan kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan

tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Sumber daya manusia (SDM) yang kompeten tersebut akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warsino, 2008).

Peraturan pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan menyatakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik.

Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan yang memadai atas kualitas dan keandalan informasi laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders*.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik yang telah disebutkan di paragraf sebelumnya merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu:

- a. Relevan, yang berarti informasi harus memiliki *feedback value*, *predictive value*, tepat waktu dan lengkap.

- b. Andal, yang berarti informasi harus memiliki karakteristik penyajian jujur, *verifiability*, netralitas.
- c. Dapat dibandingkan, berarti laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.
- d. Dapat dipahami, berarti bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna (Choirunisah,2008).

Penelitian ini menarik karena terjadinya perbedaan hasil yang dilakukan oleh (Dyah & Bestari, 2015) mengemukakan bahwa sumber daya manusia memiliki hubungan positif signifikan dengan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, semakin tinggi kualitas sumber daya manusia maka kualitas informasi laporan keuanganyang dihasilkan akan semakin baik. Sumber daya manusia yang paham akan akuntansi pemerintah dan memiliki pengalaman pada pengelolaan keuangan daerah yang dibutuhkan untuk dapat menghasilkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah yang baik. Hasil yang serupa juga di tujukan oleh penelitian dari (Iputu Upabayu, 2014) dan (Wayan Edi, 2014) menyatakan bahwa sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian lain dengan variabel independensi pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan oleh (Wayan Edi, 2014) mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi

laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, penelitian dari (Dyah & Bestari, 2015) mengemukakan hasil yang sebaliknya yakni pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Begitu juga dengan penelitian lain yang menggunakan variabel independensi Pengendalian Intern yang dilakukan oleh (Dyah & Bestari, 2015) yang mengemukakan bahwa pengendalian intern memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini memberi keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari kualitas informasi laporan keuangan melalui sistem pengendalian intern, yang berarti semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah daerah maka kualitas informasi laporan keuangannya semakin baik. Hasil dari penelitian ini juga di dukung oleh penelitian dari (Iputu Upabayu, 2014), (Wayan Edi, 2014) yang sasama menunjukkan hasil berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian dilakukan oleh (Dyah & Bestari, 2015), (Iputu Upabayu, 2014), (Wayan Edi, 2014) serta (Diana, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh (Iputu Upabayu, 2014) menyatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil dari penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian dari (Diana, 2013) yang menyimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh positif pada kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Ketidakkonsistenan hasil- hasil penelitian di atas menarik peneliti untuk melakukan penelitian kembali tentang standar akuntansi pemerintah, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan mengganti populasi dalam pengambilan sampel yakni pegawai SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Semarang.

Penelitian ini mereplikasi penelitian (Bestari&Dyah, 2015) dengan hasil penelitian hubungan positif antara sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, serta pemanfaatan teknologi yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh (Bestari&Dyah,2015) adalah peneliti menambahkan standar akuntansi pemerintah sebagai variabel independen. Penambahan ini dikarenakan pemahaman terhadap standar akuntansi pemerintah juga diperlukan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah yang relevan , transparan dan *accountable* . serta peneliti merubah lokasi pengambilan populasi dan sampel yakni pada pegawai SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Semarang. Oleh karena itu penelitian ini tertarik memberikan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasar uraian diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1 Apakah Kualitas Sumber Daya Manusia memiliki pengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
- 1.2.2 Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki pengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
- 1.2.3 Apakah Sistem Pengendalian Intern memiliki pengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
- 1.2.4 Apakah Standar Akuntansi Pemerintah pengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Menguji pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3.2 Menguji pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3.3 Menguji pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- 1.3.4 Menguji Standar Akuntansi Pemerintah terhadap pengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan khususnya peningkatan efektifitas pengelolaan sumber daya manusia pada perusahaan-perusahaan atau entitas terkait. Temuan penelitian ini juga dapat di tindak lanjuti pada penelitian selanjutnya dan memberi masukan pada aplikasi praktis bagi perusahaan terkait dengan perilaku pembuat laporan posisi keuangan untuk mengantisipasi adanya kecurangan laporan keuangan.

### **1.4.2 Mafaat Praktis**

Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, membantu memberikan kontribusi bagi praktik akuntansi di Indonesia di masa yang akan datang, dan memberikan wawasan serta wacana kepada pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Semarang. Dalam mengembangkan sumber daya, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan penerapan standar akuntansi pemerintah dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi akuntabilitas keuangan.